

ABSTRAK

DIPLOMASI TAKHTA SUCI VATIKAN DALAM MENGOTORISASI PRELAT GEREJAWI DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, 2008–2018

Oleh

VLADIMIR AUGUSTIAN SIMBOLON

Dari dekade 1950-an sampai 2000-an, umat Katolik di RRT menghadapi dualisme dalam praktik peribadatan. Pertama, mereka yang setia kepada Paus di Vatikan atau biasa disebut “Gereja bawah tanah” dan kedua, mereka yang setia kepada rezim komunis Tiongkok yang disebut “Gereja Patriotik”. Dualisme tersebut berakibat pada penunjukan sepihak para prelat Gerejawawi oleh Pemerintah RRT. Takhta Suci, sebagai otoritas tunggal resmi yang sah dalam menunjuk dan menahbiskan prelat Gerejawawi kemudian berdiplomasi dalam mendapatkan kembali wewenang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan upaya diplomasi yang dibangun oleh Takhta Suci terhadap RRT. Fokus penelitian ini ialah diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam periode 2008–2018. Dengan menggunakan teknik studi literatur, berbagai sumber data, utamanya dari laman resmi Takhta Suci dan sumber-sumber terkait lainnya, dianalisis dengan metode *content analysis*. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi dan triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Takhta Suci mewujudkan diplomasinya melalui tiga jenis diplomasi, yaitu diplomasi publik, diplomasi rahasia, dan diplomasi kepausan. Tiap-tiap jenis diplomasi membawa karakteristiknya masing-masing yang dicirikan dalam tujuan diplomasi yang diusung, kerangka diplomasi yang coba dibangun, serta elemen-elemen lainnya. Sebagai hasil dari diplomasi yang dilakukan Takhta Suci tersebut, Takhta Suci meraih kembali otoritas dalam penunjukan prelat Gerejawawinya di RRT melalui *Provisional Agreement between the Holy See and the People's Republic of China* yang ditandatangani di Beijing pada 2018. Melalui perjanjian tersebut, Takhta Suci mendapat hak veto dalam meninjau nominasi Uskup, dan Pemerintah RRT mendapat keleluasaan dalam mengatur kelompok keagamaan secara domestik.

Kata kunci: Takhta Suci, diplomasi, Republik Rakyat Tiongkok, otoritas.

ABSTRACT

THE HOLY SEE'S DIPLOMACY ON AUTHORIZING CHURCH PRELATES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, 2008–2018

By

VLADIMIR AUGUSTIAN SIMBOLON

From the 1950s to the 2000s, Catholics in China have faced dualism in religious practices. First, those who are loyal to the Pope in the Vatican, the "underground Church" and secondly, those who are loyal to the Chinese communist regime, the "Patriotic Church". This dualism resulted in the unilateral appointment of Church prelates by the Chinese government. The Holy See, as the sole and legitimate authority in appointing Church prelates, is then involved in series of diplomacy on regaining that authority. This study used a qualitative approach with descriptive analysis, to describe the diplomatic efforts made by the Holy See towards China. The focus of this research is on the diplomacy carried out by the Holy See in the 2008–2018 period. By using literature study techniques, various data sources, mainly from the Holy See's official website and other related sources, were analyzed by content analysis methods. The data was then analyzed using data reduction and triangulation techniques. The result of this study is that the Holy See implement its diplomacy through three types of diplomacy: public diplomacy, secret diplomacy and papal diplomacy. Each type of diplomacy brings its own characteristics, goals, framework, and other elements. As a result of the Holy See's diplomacy, the Holy See regained authority through the Provisional Agreement between the Holy See and the People's Republic of China, signed in Beijing in 2018. Through this agreement, the Holy See gets a veto in reviewing bishop nominations, and the Chinese government regulating religious groups domestically.

Keywords: Holy See, diplomacy, People's Republic of China, authority.